PERANAN KESEHATAN BANK DALAM MENCIPTAKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN NASIONAL

Oleh : Irma Setyawati

Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis dapat dikatakan sebagai urat nadi dari sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, mempunyai fungsi sebagai *intermediary service*.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin pesat, membutuhkan modal yang cukup besar yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana domestik, sehingga perlu adanya iklim penggalan sumber dana masyarakat melalui mobilisasi dana masyarakat yang dilakukan sektor perbankan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Otoritas Moneter, dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, telah mengeluarkan rangkaian deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang berkelanjutan, yang tujuannya untuk menciptakan iklim perbankan yang sehat, mandiri dan efisien. Kebijakan ini pertama digulirkan pada tanggal 1 Juni 1983 (Pakjun'83), merupakan awal perkembangan industri perbankan yang berdasarkan mekanisme pasar (*interest rate regulation*). Melalui Pakjun'83 bank-bank diberi kebebasan dalam memobilisasi dana masyarakat dengan menghapus pembatasan kredit dan plafon suku bunga serta pemabatasan kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLIBI). Kebijakan selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto'88), yang bertujuan meningkatkan mobilisasi dana domestik dengan menurunkan hambatan masuk ke dalam sektor perbankan, sehingga mempermudah persyaratan membuka bank baru maupun cabang bank dan penurunan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement/RR*) dari 15% menjadi 2%. Dampak dari kedua kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perbankan, baik jumlah bank dan jaringan kantor bank yang diikuti oleh peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Jumlah bank

sebelum Pakto'88 hanya 63 buah bank dan 1.863 kantor bank. Secara kumulatif pasca Pkato'88 sampai dengan 1997 jumlah bank menjadi 238 buah bank dan 7.775 buah kantor bank. Dengan struktur kelembagaan tersebut kegiatan operasional bank mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, hal ini tercermin dari hasil pengerahan dana masyarakat dari Rp. 37,5 trilyun pada tahun 1987 menjadi Rp. 357 trilyun pada tahun 1997. (Sumber : Bank Indonesia). Perkembangan mobilisasi dana masyarakat yang tinggi menunjukkan betapa besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, dengan kata lain banking habit masyarakat sudah tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang perkembangan jumlah bank dan kantor bank , serta perkembangan simpanan masyarakat, khususnya di wilayah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan sebagai obyek penelitian.

Mengingat kepercayaan masyarakat merupakan modal pokok dari kegiatan usaha bank, sementara dilain pihak bahwa bank merupakan urat nadi bagi kelancaran kegiatan perekonomian melalui fungsinya sebagai intermediary service. Menciptakan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank, tidak hanya menjadi tanggung jawab industri perbankan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank, menciptakan dan menjaga kestabilan moneter disatu pihak dan stabilitas ekonomi dilain pihak.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Untuk mencapai tujuan penulisan tersebut, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca dan menelaah buku tentang perbankan, baik buku teks atau laporan-laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pembahasan

Sesuai dengan pengertian bank menurut UU-RI No. 10/1998 tentang Perbankan, bahwa “ *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat*

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan dalam pasal 29 dikatakan bahwa *“Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”.*

Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan pokok bank diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, tentu diperlukan modal kepercayaan masyarakat dan kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada bank yang sehat. Dengan demikian tingkat kesehatan bank sangat erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Masyarakat sebagai salah satu bagian dari pelaku ekonomi, dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat perkembangan dari teknologi informasi, telah mempengaruhi perilakunya sebagai pelaku ekonomi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Soemitro Djojohadikusumo (1991:149) bahwa dalam proses pengambilan keputusan para pelaku ekonomi mengandalkan pengalaman dan pengetahuannya dari masa lalu dan masa kini, perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang ditambah dengan segenap informasi data yang sekarang tersedia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi yang tersedia tentang kondisi sektor perbankan, dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil yang berkaitan dengan dengan kepercayaan kepada bank.

Peranan bank yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi, sehingga perlu diperhatikan dan dijaga kontinuitas usahanya, dengan meningkatkan kemampuan menggali sumber dana masyarakat. Untuk itu perlu didukung oleh instrumen yang efektif yang dapat memotivasi masyarakat menyimpan uangnya di bank. Instrumen tersebut diantaranya adalah (a) adanya jaminan keamanan atas simpanan masyarakat, (b) tingkat bunga yang stabil dan kompetitif, (c) pelayanan yang baik dan (d) informasi yang tersedia tentang perkembangan industri perbankan.

Motivasi masyarakat mempercayakan dananya di bank tentunya selain mengharapkan mendapatkan keuntungan, juga mengharapkan adanya jaminan keamanan atas simpanan masyarakat secara hukum. Perilaku seseorang pada saat tertentu biasanya ditentukan oleh kebutuhan yang paling kuat, yaitu rasa aman.

Instrumen berikutnya yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap berbagai kondisi ekonomi yaitu tingkat bunga. Wasis (1998:94) mengatakan bahwa tingkat bunga yang tinggi akan dapat menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, karena para pemilik dana mengharapkan keuntungan dari dana yang disimpan di bank. Sedangkan Budiono (1980:2) mengatakan bahwa tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang yang dapat dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian bahwa tingkat bunga yang tinggi masih efektif dijadikan sebagai instrumen dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan Soemitro Djojohadikusumo (1991:149) tentang pelaku ekonomi yang memiliki perilaku rasional, yaitu perilaku ekonomi (*economic behaviour*) pada dasarnya bersifat rasional, artinya para pelaku ekonomi bersikap rasional di dalam mengadakan pilihan ekonomi dan mengambil keputusan ekonomi. Sikap ini tercermin dari perkembangan simpanan masyarakat bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah nasabah. Pada tahun 1997 perekonomian Indonesia sedang dilanda krisis dan langkah berani dari BPPN dengan melikuidasi 16 bank umum swasta nasional, yang dilanjutkan dengan program beku operasi atau pengambil alihan operasional. Namun demikian minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank masih tetap tinggi, yaitu memanfaatkan tingkat bunga deposito yang cukup tinggi (67% per bulan tahun 1997/1998), walaupun jika dilihat jumlah orang (nasabah) mengalami penurunan. Kondisi ini membuktikan masih berlakunya teori Keynes bahwa “*Bunga uang ditentukan oleh preferensi likuiditas, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi*”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga merupakan imbalan atau kontraprestasi yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana. Suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menghemat pengeluaran konsumsinya dan menyimpan bagian yang lebih dari aktiva totalnya dalam bentuk aktiva yang memberikan penghasilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari masalah kepuasan, yang dapat dipenuhi salah satunya dari pelayanan yang prima. Sehingga pembahasan masalah konsep kepuasan pelanggan (nasabah) menjadi suatu hal yang vital. Persaingan antar bank yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap bank harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari banyaknya bank menyertakan konsumennya terhadap kepuasan nasabah dalam penyertaan misinya. As. Mahmoeddin (1996:2) mengatakan bahwa *"Pelayanan yang baik merupakan salah satu syarat untuk berhasilnya bank dalam usaha pengumpulan dana sebanyak mungkin, penjualan jasa seoptimal mungkin yang pada akhirnya memperoleh laba semaksimal mungkin"*. Sedangkan Tjiptono, yang mengutip pendapat Engel, et.al. (1995:27) mengatakan bahwa *"Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan"*. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik, ramah, cepat dan akurat merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap petugas bank, yang harus memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Perilaku masyarakat sebagai pelaku ekonomi tentu sangat berkepentingan dengan tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan atau pengambilan keputusan secara rasional berdasarkan pengalaman dan informasi yang diperoleh. Kondisi perilaku masyarakat yang semakin kritis, menuntut peranan Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan informasi, dapat secara aktif mensosialisasikan setiap perubahan kebijakan tentang perbankan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan perbankan dengan baik, khususnya tingkat kesehatan bank. Dengan demikian informasi dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sumitro Djojohadikusumo (1991:149) tersebut diatas.

Pada akhir tahun 2001 Bank harus memenuhi persyaratan kesehatan Bank dari Bank Indonesia, yaitu CAR minimal 8 % dan NPL maksimal 5 %. Adapun tahapan penyusunan cetak biru perbankan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Langkah 1

Analisis CAMEL berdasarkan peraturan Bank Indonesia untuk mengklasifikasikan Bank sehat dan Bank tidak sehat

2. Langkah 2

Klasifikasi bank meliputi proses penyaringan bank sehat menjadi bank kuat dan bank lemah. Parameternya adalah kualitas SDM (manajemen profesional dan uji kepatutan / *Fit and Proper Test* pemegang saham), Kemampuan finansial (tingkat permodalan, skala ekonomi, efisiensi dari akumulasi dana / pendanaan dan kemampuan menyalurkan kredit kepada sektor riil), tingkat keunggulan kompetitif secara regional dan *good governance* manajemen kredit yang *prudent*

3. Langkah 3

Evaluasi terhadap nilai waralaba (*franchise Value*) untuk bank yang tidak sehat

untuk menentukan apakah bank tersebut diikutsertakan dalam proses konsolidasi atau harus ditutup

4. Langkah 4

Proses pemetaan bank yang kuat dan bank yang lemah untuk menentukan posisi relatif dari setiap Bank di dalam perbankan

5. Langkah 5

Proses pengelompokan untuk menentukan kelompok bank dengan cara, pertama, penggabungan bank-bank (*Merger Banks*) yang terdiri dari merger yang tidak diperlukan injeksi modal dan merger diperlukan injeksi modal. Kedua, bank berdiri sendiri (*Stand Alone Banks*), yang terdiri atas bank yang tidak diperlukan injeksi modal dan diperlukan injeksi modal.

Parameter yang digunakan pada langkah 5 :

1. Infrastruktur jaringan distribusi

- Cabang

- Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Jaringan pendebet
- Pelayanan perbankan on-line dan melalui telepon
- Rencana pengembangan
- 2. Bank Konsumer (*Consumer Banking*)
 - Deposito
 - Produk / Portofolio Kartu Kredit
 - Kredit konsumsi dan produk lainnya
 - Pelayanan perbankan melalui internet
- 3. Bank Korporasi dan retail (*Corporate dan Retail Banking*)
 - Pinjaman (*Loans*)
 - Rencana usaha (*Business Plan*)
 - Manajemen resiko
- 4. Sumber Daya Manusia
- 5. Teknologi dan Operasi
 - Infrastruktur teknologi
 - Teknologi untuk manajemen resiko
- 6. Peraturan dan aspek legal Litigasi, kontingensi, dan aspek legal lainnya

6. Langkah 6

Proses penentuan posisi akhir akan mengarahkan bank-bank untuk menjadi :

o Bank Inti (*Core Banks*)

1. Bank Internasional

- Memiliki cabang di seluruh propinsi
- Memenuhi standar perbankan internasional
- Kemampuan permodalan untuk operasi skala nasional
- Pelayanan yang meliputi seluruh produk perbankan
- Nasabah korporasi besar, menengah dan retail

2. Bank regional

- Pelayanan produk perbankan terbatas sektor tertentu

- Bank berdasarkan tata nilai agama (mis. Bank Syariah)
- Geografi (mis. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi)
- Nasabah (mis. Korporasi besar, menengah)

o **Bank Non-Inti (*Non-Core Banks*)**

Bank khusus menawarkan produk tertentu seperti :

- Pembiayaan sektor pertanian dan agribisnis
- Pembiayaan untuk usaha kecil
- Bank tabungan nasional khusus untuk Kredit Pemilikan Rumah
- Pembiayaan untuk proyek-proyek nasional berskala besar

Parameter yang digunakan untuk mencapai proses akhir adalah sebagai berikut :

- Jenis usaha
- Jumlah cabang
- Bank devisa
- Teknologi dan operasi
- Budaya perusahaan

Dengan melakukan keenam langkah di atas, maka perbankan nasional dapat dipetakan sebagaimana gambar 1 berikut:

Gam

bar 1. Pemetaan Perbankan Nasional

Terdapat beberapa alternatif dalam rangka menyehatkan perbankan nasional, yaitu :

1. Mengubah peraturan Bank Indonesia (CAR 8% dan NPL 5%), akan tetapi alternatif pertama akan menimbulkan *moral hazard* karena CAR 8% belum cukup untuk mendukung Bank yang kuat dan efisien
2. Redistribusi obligasi pemerintah, tetapi alternatif kedua sulit dilakukan karena tidak sesuai dengan kondisi pasar
3. Penukaran dengan aset (*Asset Swap*), alternatif ketiga juga sulit dilakukan disebabkan terbatasnya aset yang telah direstrukturisasi di BPPN, sulitnya penentuan harga, dan mekanisme swap
4. Konsolidasi dan merger, alternatif keempat, konsolidasi bank-bank nasional menjadi pilihan yang paling menguntungkan, karena - Bank-Bank hasil konsolidasi / merger dapat mencapai skala ekonomi yang menguntungkan, meningkatkan nilai bank-bank nasional dan akan menarik investor, di samping itu pengawasan lebih efektif dengan berkurangnya jumlah Bank.

Cara memilih bank yang sehat dan layak dipercaya dapat digunakan dua faktor yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur, yaitu :

1. Faktor kuantitatif

Indikator kesehatan bank secara kuantitatif dapat dilihat dari rasio-rasio keuangannya, yaitu, pertama, rasio kecukupan modal/*capital adequacy ratio* (CAR). Secara sederhana, rasio ini mencerminkan tingkat kekuatan permodalan bank menghadapi kemungkinan terjadinya kredit macet. Saat ini, Bank Indonesia menentukan batasan minimal CAR adalah 8%. Jika rasio kecukupan modal sebuah bank berada di bawah 8%, kemungkinan besar Bank Indonesia akan melikuidasi atau menutup bank tersebut. Meskipun resminya BI masih membatasi CAR minimal sebesar 8%, namun di pasar umumnya orang menilai sebuah bank layak dikatakan sehat jika CAR-nya tidak lebih kecil dari 12%. Kedua, dilihat pula dari rasio kredit bermasalah/*nonperforming loan* (NPL). Berbalikan dengan CAR, semakin kecil rasio NPL ini semakin aman bank tersebut. BI sendiri mematok batasan NPL ini maksimal 5%.

Di luar dua rasio utama kesehatan bank tadi, ada beberapa rasio lain yang bisa dapat diperhatikan untuk memantapkan langkah memilih sebuah bank. Dalam rasio penyaluran kredit/*loan to deposit ratio* (LDR), bank yang sehat adalah bank yang tingkat LDR-nya tinggi, namun tingkat NPL-nya rendah. Ini berarti bank tersebut cukup aktif menyalurkan kredit dan kredit tersebut lancar. Angka ideal LDR ini adalah sekitar 85%-90%. Rasio lain adalah rasio bunga bersih alias *net interest margin* (NIM) yang mencerminkan tingkat keuntungan sebuah bank. Semakin besar NIM-nya, semakin besar dan semakin sehat sebuah bank.

2. Faktor kualitatif

Faktor kualitatif dapat dicermati dari *track record* pemegang saham mayoritas sebuah bank. Secara umum, dapat dibedakan kepemilikan saham bank menjadi bank lokal dan bank asing. Umumnya, orang menilai prosedur audit bank asing lebih ketat dibandingkan dengan bank lokal. Meskipun kini, prosedur audit bank lokal juga mulai membaik.

Penutup

Cetak biru perbankan nasional ini sangat diperlukan saat ini mengingat rencana pemberlakuan peraturan Bank Indonesia pada akhir tahun 2001 di mana semua bank diharuskan memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8% dan tingkat kredit bermasalah (NPL) maksimal 5%.

Dari catatan Bank Indonesia akan terdapat kurang lebih 20 bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas. Beberapa alternatif penyelesaian masalah ini, maka penggabungan dan konsolidasi bank-bank merupakan alternatif yang terbaik.

Turunnya batas penjaminan hanya berlaku untuk simpanan di bawah Rp 100 juta. Agar dana simpanan aman, supaya dipilih bank yang sehat dan berwatak baik. Sebetulnya dana talangan dari LPS dibutuhkan hanya jika bank tempat menyimpan dana bermasalah, bangkrut, dan akhirnya dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Kalau banknya sehat, mestinya berapa pun besarnya dana simpanan tak ada masalah sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bi.co.id>

<http://www.kompas.com>

<http://www.liputan6.com>

<http://www.google.com>

Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Retnadi, Djoko, *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo., 2006